

ISSN: 2460-1896
e-ISSN: 2541-5573

Volume 4, Nomor 2, Desember 2018

> Islamic Economics Journal

Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada
BASZNAS Magelang
Mufti Afif, Sapta Oktiadi

Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How Does Zakah Impact Both of
Them at Once?
Ade Nur Rohim

Analisis Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo)
Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam

Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul
Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang
Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, Fien Zulkarijah

Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan Perspektif Manajemen Syariah
Salman Al Parisi

Pengembangan Model *Low Cost Islamic Peer To Peer Financing* Berbasis *Financial
Technology* Untuk Akselerasi Kinerja UMKM
Satria Utama, Inayatul Ilahiyah

An Empirical Study On The Influence Of Islamic Values On Money Demand (Case
Study: University of Darussalam, Gontor and Mantingan Campus)
Muhammad Fahmi Jauharuddin Rimas Sude, Khoirul Umam

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan Perspektif Manajemen Syariah

Salman Al Parisi

Magister of Islamic Management SB IPB, Jl. Raya Pajajaran Bogor Utara Bantarjati, Jawa Barat 16151; Awardee LPDP PK 103 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email: salman_alparisi@apps.ipb.ac.id

Abstract

Inflation is one of problem in economy. Data BPS from January 2010 until December 2017, explained that average inflation in Indonesia showed a high trend at 5.24 percent. This paper uses Multiple Linear Regression Model. This paper tried to analyze the influence of human error inflation (corruption, money supply and the excess of tax rate) on inflation in Indonesia. The result showed that LNMoney Supply has significant positive effect on inflation rate at alpha 5%, ceteris paribus. Control of corruption has signifikan negative effect on inflation rate at alpha 1%, ceteris paribus. Then, Lntax has significant positive effect on inflation rate at alpha 1%, ceteris paribus. Therefore Islam and Al-Maqrizi prohibit the corruption practices and the use of interest rates as an instrument of government policy.

Keywords: *Inflation, Human Error Inflation Al-Maqrizi Approach, Multiple Linear Regression*

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian. Data Badan Pusat Statistik dari bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2017 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi Indonesia menunjukkan tren yang masih cukup tinggi sebesar 5.24 persen. Studi ini menggunakan metode Regresi Linear Berganda (RLB). Studi ini mencoba menganalisis pengaruh human error inflation (korupsi, jumlah uang beredar dan pajak yang berlebihan) terhadap tingkat inflasi

Indonesia. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa LNMoney Supply berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 5%, ceteris paribus. Control of corruption menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1%, ceteris paribus. Dan LNPajak menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1%, ceteris paribus. Maka dari itu Islam dan Al-Maqrizi melarang adanya praktek korupsi dan penggunaan interest rate sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah.

Kata kunci: Inflasi, Pendekatan Human Error Inflation Al-Maqrizi, Regresi Linear Berganda.

Pendahuluan

Inflasi termasuk masalah yang tidak sederhana dan digolongkan sebagai penyakit ekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap variabel makro ekonomi agregat, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan.¹ Inflasi ditandai dengan kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan hanya menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat.² Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.³ Adapun beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Bebas, dan Indeks Harga Implisit atau GDP Deflator.⁴

Secara umum, suatu kebijakan moneter diarahkan kepada beberapa tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi antara lain tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan riil yang cukup tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, kondisi finansial yang stabil, defisit transaksi perdagangan yang tidak

¹ Endri, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia," *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol. 13 No. 1, 2008, hlm. 1-13.

² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27

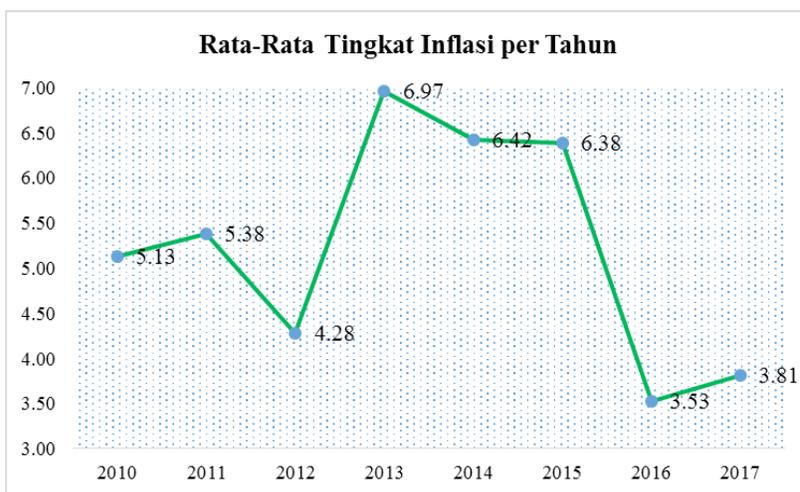
³ Boediono, *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, No. 2 Edisi 4*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995), hlm. 33.

⁴ Rahardja Prathama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro, edisi ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 34.

terlalu berlebihan, dan nilai tukar yang stabil.⁵

Sejak Juli 2005 Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Dalam kerangka ITF masih menggunakan elemen suku bunga BI Rate sebagai sasaran operasional. Hal ini sudah jelas bahwa suku bunga merupakan salah satu penyebab inflasi. Tingkat inflasi cenderung mengalami fluktuasi selama delapan tahun terakhir. Rata-rata tingkat inflasi selama tahun 2010 sebesar 5.13 persen. Dan mengalami penurunan nilai rata-rata hingga 3.53 persen pada tahun 2016. Kemudian, nilai rata-rata tingkat inflasi mengalami peningkatan 0.28 basis *point* hingga 3.81 persen pada tahun 2017. Sedangkan inflasi *year on year* (Desember 2016 –Desember 2017) masing-masing sebesar 3.02 persen dan 3.61 persen, artinya terjadi kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya.⁶

Gambar 1 : Rata-rata Tingkat Inflasi per Tahun



Sumber: Bank Indonesia (2018)

Rata-rata tingkat inflasi mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terus-menerus terdepresiasi terhadap kurs Dollar Amerika hingga tercatat (1 USD = Rp 13.849,-) pada 23 Maret 2018, sehingga berdampak

⁵ Halim Alamsyah dan Abdul Kadir Masyhuri, " Inflation Targeting Sebagai Kerangka Kerja Alternatif Dalam Kebijakan Moneter," *paper*, Mimeo, 2000.

⁶ Bank Indonesia, "Data Inflasi Indonesia", sumber dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 April 2018.

pada kenaikan harga komoditas barang. Dengan naiknya harga-harga barang maka diduga terjadi dua asumsi, pertama masyarakat akan tetap membeli sehingga memicu jumlah uang beredar (JUB) meningkat. Kedua, masyarakat akan mengurangi konsumsinya sedangkan penghasilan tetap, sehingga jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat tetap tinggi akan tetapi berbeda dengan asumsi yang pertama, JUB di masyarakat tidak tersalurkan ke kas penjual dan pemerintah, sehingga JUB menumpuk dan tidak bersirkulasi semestinya.

Pemikir ekonomi Islam, Al-Maqrizi sudah lebih jauh memiliki konsep pemikiran mengenai uang dan inflasi. Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seantero dunia dulu, kini hingga masa mendatang. Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi menjadi dua faktor penyebab yaitu *natural inflation* (inflasi alamiah) dan human *error inflation* (inflasi disebabkan kesalahan manusia).⁷ Inflasi dapat memicu krisis ekonomi, Menurut Al-Maqrizi, krisis ekonomi ini terjadi disebabkan oleh tiga alasan: yaitu, korupsi politik, meningkatnya harga tanah, sirkulasi jumlah uang beredar.⁸

Gambar 2: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



Sumber: Transparansi Internasional (<https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>)

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 424.

⁸ Hiroshi Kato, "Reconsidering al-Maqrīzī's View on Money in Medieval Egypt," *Mediterranean World*, Vol. 21, 2012, hlm. 33-44.

Jika melihat grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2002 hingga 2011 terus mengalami peningkatan. Hal ini bukan sebuah prestasi melainkan bukti bahwa Indonesia mengalami krisis moral, jika dibiarkan akan menyebabkan krisis keuangan dan akhirnya menimbulkan mafsadah (kerusakan) kepada masyarakat.

Pada hakikatnya, inflasi tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, upaya yang dapat dilakukan yaitu meminimalisir tingkat inflasi hingga tingkat inflasi yang rendah. Al-Maqrizi memiliki konsep utama mengenai inflasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dibagi menjadi dua bagian yaitu inflasi alamiah dan inflasi atas kesalahan manusia. Adapun natural inflasi sulit untuk dihindarkan oleh manusia. Menurut Al-Maqrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan.⁹ Sedangkan faktor determinan inflasi karena kesalahan manusia (*human error*), yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Maka dari itu, inflasi dapat diminimalisir melalui pembenahan faktor *human error* seperti korupsi, dan sirkulasi mata uang (JUB).

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa studi ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh *human error* (korupsi, sirkulasi jumlah uang beredar, *interest rate*) terhadap kenaikan tingkat inflasi di Indonesia dan apa saja solusi yang dapat ditawarkan oleh manajemen syariah terhadap penekanan tingkat inflasi?

Kajian Pustaka

Pengertian Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.¹⁰ Adapun definisi dalam *Dictionary of Economics of Money and Bank* dikatakan, inflasi merupakan suatu keadaan di

⁹ Aam Slamet Rusydiana, "Determinan Inflasi Indonesia: Perbandingan Pendekatan Islam dan Konvensional," *JIBE: Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 3 No.1 2009, hlm. 1-40.

¹⁰ Bank Indonesia, "Pengertian Inflasi," sumber dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengertian/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 April 2018.

mana harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan yang terutama disebabkan karena penawaran akan uang jauh melebihi permintaan akan uang.¹¹

Menurut Teori Keynes inflasi disebabkan oleh perilaku suatu masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Menurut pandangan ini, Hal tersebut merupakan bagian proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut yang menyebabkan keadaan dimana permintaan masyarakat bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang-barang di pasar. Sedangkan menurut Irving Fisher inflasi diartikan kenaikan harga-harga umum (P) yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang beredar (M), kecepatan peredaran uang (V), dan jumlah barang yang diperdagangkan (T). Inflasi adalah proses kenaikan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan prosentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya satu sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.¹²

Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tetapi bisa juga menggunakan harga-harga lain seperti harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya. Biasanya diekspresikan sebagai presentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Selain itu, tingkat inflasi yang rendah dianggap oleh sejumlah ekonomi sebagai hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi.¹³

¹¹ Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 154.

¹² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 68.

¹³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89.

Indikator inflasi berdasarkan International Best Practice:¹⁴

1. Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota.
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi

Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama*, tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Inflasi ini timbul jika permintaan agregat meningkat karena banyaknya permintaan konsumen, artinya lebih besar permintaan terhadap barang dibandingkan dengan penawaran barang. *Kedua*, dorongan biaya (*cost push inflation*). Inflasi ini timbul karena desakan biaya artinya harga modal mahal sehingga hasil produksi dari modal tersebut juga mahal.¹⁵ Selain itu inflasi yang timbul karena desakan biaya disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, dan peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah serta terjadinya negatif *supply shock* akibat terjadi bencana alam dan terganggunya distribusi. *Ketiga*, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh

¹⁴ Bank Indonesia, "Pengenalan Inflasi," sumber dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 April 2018

¹⁵ Eddy Gunawan, "Beberapa Penyelesaian Inflasi Menurut Sistem Keuangan Islam di Indonesia," *ISEFID Review*, Vol. 2 No. 1, 2003, hlm. 64-74

perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap kegiatan perekonomian (konsumsi, produksi dan distribusi) seperti jual beli barang dan jasa. Hal ini tercermin dari sikap pelaku ekonomi dan masyarakat dalam hal tersebut apakah lebih cenderung bersikap adaptif atau *forward looking market condition*.¹⁶

Pertumbuhan jumlah uang yang rendah berpengaruh dalam menurunkan tingkat inflasi.¹⁷ Fluktuasi nilai tukar cenderung memberikan efek terhadap inflasi. Inflasi di Indonesia terus meningkat hingga 200 persen pada awal-awal tahun 1998.¹⁸ Menghadapi masalah ini pemerintah mengambil kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga.¹⁹

Menurut Boorman (1975), Djiwandono (1980), Nasution (1983), Ahmad (1985) dan Ikhsan (1991), penyebab inflasi ada dua macam yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Selain itu, ada beberapa faktor lain dari inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat dari buruknya sistem pemerintahan.²⁰

Sistem keuangan yang berasaskan bunga menjadikan sistem moneter di Indonesia dominan menggunakan bunga, khususnya perbankan konvensional. Padahal jika perbankan tanpa bunga, maka membuat kegemaran investor dalam melakukan investasi meningkat, akibatnya penawaran-penawaran barang pun meningkat. Sehingga pada akhirnya dapat mengimbangi kenaikan permintaan masyarakat sekaligus dapat menahan laju inflasi. Menurut teori klasik, peniadaan tingkat bunga atau pengurangannya dapat menyebabkan harga modal menjadi rendah, sehingga permintaan menjadi meningkat, dimana kuantitas berbanding terbalik dengan harga.²¹

¹⁶ Bank Indonesia, "Pengenalan Inflasi," sumber dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 April 2018.

¹⁷ Sadiq Ahmed, *et.al.*, "How Indonesia's Monetary Policy Affects Key Variables", *Asia Regional Office, Country Department V, World Bank*, 1990, hlm. 2.

¹⁸ Reza Yamora Siregar, "Real Exchange Rate Targeting and Inflation in Indonesia: Theory and Empirical Evidence." *Applied Financial Economics*, Vol. 9 No. 4, 1996, hlm. 329-336.

¹⁹ Eddy Gunawan, "Beberapa Penyelesaian Inflasi...", hlm. 64-74

²⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 100.

²¹ Eddy Gunawan, "Beberapa Penyelesaian Inflasi...", hlm. 64-74

Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham, yang mana memiliki nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Syekh An-Nabhani (2001) memberikan beberapa alasan mengenai mata uang yang sesuai untuk digunakan seperti emas. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.²²

- a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah bentuk emas.
- b. Rasulullah saw telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- c. Ketika Allah swt mewajibkan zakat uang. Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.
- d. Hukum- hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Penurunan nilai dinar dan dirham masih mungkin terjadi yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Zaman Rasulullah pernah mengalami kondisi defisit dan ini hanya satu kali terjadi yaitu sebelum Perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia.²³

Konsep Inflasi Al-Maqrizi

Metode dan cara yang dilakukan oleh Al-Maqrizi enam ratus tahun yang lalu masih relevan dilakukan pada masa kini, Al-Maqrizi berpendapat dampak *hyperinflation* yang melanda perekonomian Mesir pada waktu tersebut disebabkan oleh administrasi pemerintahan yang tidak efisien dan dilakukannya *extraordinary*

²² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 121

²³ *Ibid.*

crime (korupsi), praktik suap-menyuap, komersialisasi jabatan, kolusi, nepotisme dan pada saat waktu yang sama diberlakukan pajak represif oleh pemerintah yang tidak akuntabel terhadap rakyat sehingga merugikan insentif para petani untuk bekerja, dan akhirnya menyebabkan kemerosotan yang signifikan dalam produksi pertanian sebagai sektor kehidupan yang dominan pada saat itu. Jika kita korelasikan dengan Indonesia sebagai Negara yang agraris, kaya sumber daya alam. Maka konsep Al-Maqrizi termasuk tepat untuk diimplementasikan dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembenahan administrasi pemerintahan yang bersih dari tindakan *extraordinary crime*.²⁴

Adapun Al-Maqrizi membagi masyarakat Mesir menjadi tujuh kelompok strata sosial bertujuan untuk mengetahui kelompok strata yang mana yang lebih merasakan dampak *hyperinflation*. Kelompok pertama adalah penguasa dan para pembantunya (*ahlud daulah*). Kelompok kedua adalah para pengusaha, pedagang besar dan orang yang hidupnya mewah (*ahlul yasar*). Kelompok ketiga adalah golongan menengah dari para pengusaha dan pedagang termasuk kaum profesional (*ashābul hirfah*). Kelompok keempat adalah petani yang umumnya hidup di pedesaan. Kelompok kelima adalah golongan fakir yang menurut Al-Maqrizi adalah semua *fuqoha*, mahasiswa, dan prajurit. Kelompok keenam adalah para pekerja kasar dan para nelayan. Dan terakhir kelompok ketujuh adalah golongan papa dan peminta-minta. Setelah membagi menjadi beberapa kelompok, Al-Maqrizi menegaskan intensitas kepedihan dan penderitaan yang dialaminya akibat *hyperinflation*. Dan kelompok yang lebih merasakan penderitaan dengan adanya *hyperinflation* adalah kelompok kelima karena pendapatan mereka yang berupa upah dan gaji bersifat tetap. Adapun golongan keenam dan ketujuh, tidak hanya merasakan penderitaan dengan adanya *hyperinflation* melainkan juga dapat dikatakan mati kelaparan.²⁵

Natural Inflasi

Inflasi ini timbul lebih dominan disebabkan oleh gejala alam yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Menurut Al-Maqrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya menjadi langka karena gagal panen, di lain

²⁴ "Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi Sebagai Solusi Bencana Moneter," sumber dari <https://dokumen.tips/documents/pemikiran-ekonomi-al-maqrizi.html>, diakses pada tanggal 15 April 2018.

²⁵ *Ibid.*

pihak karena sifatnya yang signifikan dalam kelangsungan hidup manusia, maka permintaan terhadap bahan makanan meningkat, sehingga menyebabkan harga-harga naik dan memicu terjadi inflasi.²⁶ Inflasi jenis pertama ini yang terjadi pada zaman Rasulullah saw dan *khulafaur rasyidin* yaitu karena kekeringan (berkurangnya persediaan barang) atau karena peperangan.²⁷

Human Error Inflasi

Adapun faktor yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Al-Maqrizi menganalisis ada tiga hal utama yang menjadi penyebab inflasi, yaitu: korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan lagi memberatkan, dan peningkatan sirkulasi jumlah uang yang berlebihan.²⁸ Sudah menjadi barang tentu, jika dikaitkan dengan Indonesia, maka kita dapat menelaah lebih dalam mengenai tingkat korupsi Indonesia yang cenderung menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Gunawan timbulnya inflasi akibat krisis kepribadian, krisis keimanan, krisis moral dan gaya hidup yang materialistik.²⁹

Istilah korupsi secara literal tidak dikenal dalam khasanah Islam klasik. Hal ini disebabkan korupsi merupakan istilah kontemporer yang diserap dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti perbuatan buruk, busuk, atau dengan beberapa tindakan lain yang tidak bermoral.³⁰

Dalam buku *Ighātsatul Ummah Bikasyfil Ghummah*, Al-Maqrizi menguraikan perkembangan sejarah mata uang serta menganalisis secara ilmiah peran dan pengaruh uang dalam perekonomian. Penjelasan tentang fungsi dan peran uang dalam ekonomi dimasukkan dalam konteks ekonomi modern sebagai ekonomi moneter. Jika kita kaitkan dengan krisis moneter yang menerpa perekonomian global, maka hal ini menjadi bukti bahwa ekonomi moneter konvensional yang ada seperti saat ini hanya akan menyebabkan krisis moneter, karena salah satu penyebab utama krisis moneter modern adalah persoalan bunga (*interest*) yang menjadi instrument kebijakan moneter. Al-Maqrizi mengajukan untuk menggunakan sistem moneter alami yang

²⁶ Aam Slamet Rusydiana, "Determinan Inflasi Indonesia:...", hlm. 1-40.

²⁷ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 125

²⁸ Aam Slamet Rusydiana, "Determinan Inflasi Indonesia:...", hlm. 1-40.

²⁹ Eddy Gunawan, "Beberapa Penyelesaian Inflasi...", hlm. 64-74

³⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), hlm. 5.

menggunakan dinar dan dirham dalam kegiatan ekonomi.³¹ Al-Maqrizi menyarankan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.³²

Penelitian Terdahulu

Table 1: Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Metodologi dan Hasil
Ambok Pangiuk	Inflasi Pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al-Maqrizi.	Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 28 No. 01, 2013, Hal. 147-173.	Kualitatif – Kajian Literatur Berdasarkan penggolongan strata oleh Al-Maqrizi ini dapat disimpulkan bahwa analisa pada fenomena sosial ekonomi dan dampak inflasi tergantung pada hakikat pendapatan (<i>income</i>) dan kekayaan (<i>wealth</i>) masing-masing golongan. Adapun yang menyebabkan inflasi adalah sistem administrasi yang korup, membebankan pajak berlebihan bagi rakyat dan pencetakan uang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan tingkat produksi suatu negara.
Idris Parakkasi	Inflasi Dalam Perspektif Islam.	Laa Maisyir Vol. 03 No. 01, 2016, Hal. 41-58.	Kualitatif – Kajian Literatur Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi di antaranya memperbaiki sistem moneter, memperbaiki moral pejabat dan tata kelola pemerintahan, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi. Mengarahkan pola belanja, melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi.

³¹ Taqiyyuddin Abi al-'Abas Ahmad bin 'Ali Al-Maqrizi, *Ighātsatul Ummah Bikasyfil Ghummah*, (El-Haram: 'Ainul Madrasat wal Buhuts al-Insaniyah wal Ijtima'iyah, 2007) hlm. 137.

³² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 122.

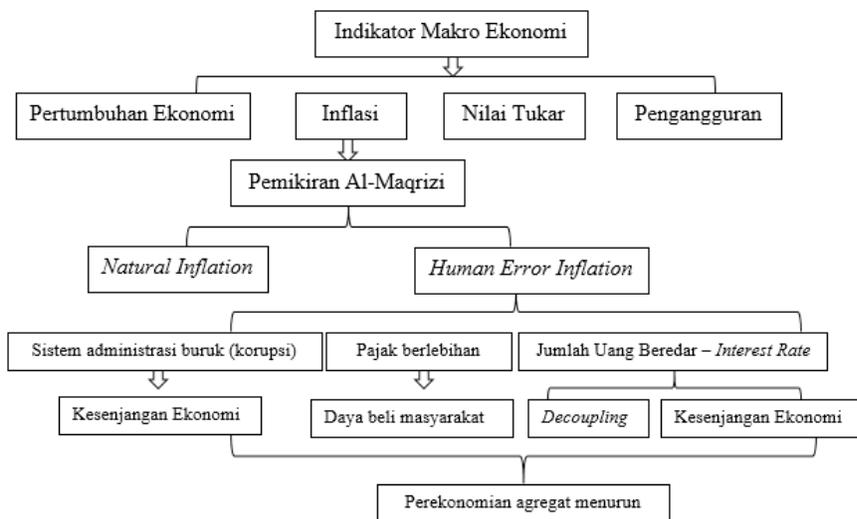
Penulis	Judul	Nama Jurnal	Metodologi dan Hasil
Aam Slamet Rusyiana	Telaah Pemikiran Ekonomi Maqrizi Tentang Inflasi.	Jurnal Kordinat Vol. 11, No. 01, 2009.	<p>Kualitatif – Kajian Literatur</p> <p>Pemikiran ekonomi Al-Maqrizi tentang inflasi lebih komprehensif dibanding konsep yang ditawarkan ekonom Barat. Salah satu alasannya adalah karena baik inflasi yang disebabkan oleh nature/alami maupun inflasi ulah manusia, keduanya dapat berbentuk <i>cost push</i> maupun <i>demand pull inflation</i>.</p>
Westi Riani	Inflasi dan Tinjauannya Dalam Perspektif Islam.	Jurnal Kinerja Vol. 05, No. 01, 2003, Hal. 53-61.	<p>Kualitatif – Kajian Literatur</p> <p>Faktor yang mempengaruhi inflasi diantaranya; dorongan kenaikan permintaan, tekanan kenaikan upah, dan harapan masyarakat mengenai tingkat harga di masa datang.</p> <p>Kenaikan inflasi dapat mempengaruhi kenaikan tingkat bunga, turunnya pendapatan riil masyarakat yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Dalam perspektif Islam, inflasi didorong oleh hasrat manusia akan harta (materi) yang berlebihan. Manusia cenderung mengejar kemewahan dunia, melupakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di bumi.</p>

Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan Perspektif Manajemen Syariah

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Metodologi dan Hasil
Muhammad Anif Afandi	Determinan Inflasi dari Sisi Supply (<i>Cost-Push Inflation</i>) di Indonesia.	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 16, No. 2, 2015, Hal. 132-145.	<p>Model VECM</p> <p>Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi IHK itu sendiri, harga BBM, nilai tukar Rupiah, dan upah nominal berpengaruh signifikan terhadap inflasi IHK di Indonesia. Sedangkan, variabel BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi IHK. Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel harga BBM, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi IHK. Sedangkan, variabel upah nominal tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi IHK dalam jangka panjang. Hasil estimasi VECM dalam studi ini juga menghasilkan analisis penting, yaitu IRF (Impulse Response Function) dan VDC (Variance Decomposition).</p>

Dekomposisi Masalah

Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat flow chart yang menjadi gambaran umum dari pembahasan paper ini sebagai berikut:



Gambar 3: Dekomposisi Masalah

Indikator makro ekonomi Indonesia terdiri atas pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, pengangguran dan inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian suatu negara, sehingga negara perlu menjaga tingkat inflasi. Menurut Al-Maqrizi inflasi dibagi menjadi dua kategori, pertama inflasi yang alami dan kedua inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Adapun jenis inflasi kedua diakibatkan oleh sistem administrasi yang buruk (korupsi), pemungutan pajak yang berlebihan dan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi oleh jumlah aktivitas produksi. Hal ini disebabkan oleh sistem moneter yang menggunakan sistem bunga saat ini. Pada akhirnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan aktivitas perekonomian secara agregat yang diawali dengan adanya kesenjangan ekonomi, daya beli masyarakat yang menurun, *decoupling* antara sektor moneter dan sektor riil dan sebagainya.

Metodologi

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) untuk kurun waktu tahun 2010-2016. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan *Worldwide Governance Indicator (WGI)*. Adapun data lainnya, dikumpulkan dari sumber studi kepustakaan seperti jurnal ilmiah, skripsi, dan referensi buku-buku terkait tema penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model Regresi Linear Berganda. Adapun *software* yang digunakan yaitu Eviews 6 dan Ms. Excel 2013.

Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda berguna untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) atau untuk mencari hubungan fungsional dua prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya. Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan dengan X sedangkan variabel tidak bebas dinyatakan dengan Y. Model regresi linier berganda dalam studi ini sebagai berikut:³³

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon_i$$

.....(1)

Keterangan:

Y : Variabel terikat

β_0 : *Intersep*

β_1 : Koefisien (slope kemiringan) dari variabel atau atribut ke-i

X_{ij} : Variabel bebas prediktor ke-j dari responden ke-i, disebut juga atribut

ϵ_i : Kekeliruan yang terjadi dalam usaha untuk mencapai harga yang di harapkan, dengan $i = 1, 2, 3, \dots, n$

$$\text{Inflasi} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Money Supply} + \beta_2 \text{ Control of Corruption} + \beta_3 \text{ Pajak} + \epsilon_i \dots \dots (2)$$

³³ Riang Enjelita Nduru, dkk, "Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi di Deli Serdang," *Saintia Matematika*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 71-83

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa inflasi merupakan fungsi dari Jumlah Uang Beredar (*money supply*), *control of corruption*, dan pajak. Sampel yang digunakan adalah nilai-nilai variabel independen yaitu *money supply*, *control of corruption*, dan pajak sedangkan peubah variabel dependen-nya adalah inflasi. *Money supply* menggambarkan banyaknya jumlah uang yang beredar setiap periode studi ini (bulanan), kemudian *control of corruption* menggambarkan estimasi performa kinerja pemerintah dalam mengontrol korupsi dengan rentang -2.5 (*weak*) – 2.5 (*strong*) selama 2010-2016. Dan pajak menggambarkan penerimaan APBN dari pajak selama 2010-2016.

Pengujian Signifikansi

Sebagai pengujian secara statistik untuk melihat kekuatan dari suatu hasil perhitungan digunakan pengujian statistik yang biasa digunakan secara umum yakni Koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*), dengan melihat nilai R^2 dapat diketahui seberapa jauh variasi variabel independent dapat menerangkan dengan baik variasi variabel *dependent* yang digunakan dalam suatu model persamaan regresi. Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi *dependent* dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:³⁴

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti variabel-variabel bebas dalam suatu model persamaan cenderung tidak mampu menjelaskan variasi variabel tidak bebas.
- Nilai R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas dalam suatu model dapat menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

Uji Signifikansi (Uji Statistik t dan Uji F)

Uji statistik t atau uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependent* dan digunakan

³⁴ Damodor N. Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan oleh Sumarno Zain, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 98.

untuk melihat parameter individual dari masing-masing variabel *independent* dengan hipotesis sebagai berikut:³⁵

- H0 : $\beta_i = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang nyata dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
H1 : $\beta_i \neq 0$, artinya ada pengaruh yang nyata dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Kriteria Uji:

Jika $t_{-hitung} > t_{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
Jika $t_{-hitung} < t_{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Sedangkan uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel *independent* berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* yaitu pertumbuhan ekonomi dengan hipotesis sebagai berikut:

- H0 : $\beta_i \dots n = 0$, semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.
H1 : $\beta_i \dots n \neq 0$, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.

Kriteria Uji:

Jika $F_{-hitung} > F_{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
Jika $F_{-hitung} < F_{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data, maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik, sebaliknya jika asumsi klasik terpenuhi maka menggunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus bebas dari multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu

³⁵ Damodora N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika jilid 1*, diterjemahkan oleh Mulyadi, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 70.

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu di dalam pengujiannya terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section*. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (u^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = n \cdot R^2$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs*R-Squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.³⁶

2. Uji Autokorelasi

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada Eviews dengan menggunakan *Ramsey Test* dengan membandingkan nilai Prob F dengan taraf signifikansi (*alpha*). Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika nilai prob. F lebih besar dari nilai taraf signifikansi (*alpha*).

4. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika nilai koefisien determinasi R^2 sangat tinggi, tetapi secara individual variabel- variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat, maka hal tersebut mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas. Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi multikolinearitas. Kriteria pengujian tersebut yaitu jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 regresi *auxiliary*, maka di dalam model tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.³⁷

5. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi

³⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 25.

³⁷ *Ibid.* hlm. 26.

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa pada uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak berlaku. Dalam mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual, maka dapat dilakukan uji *Jarque-Bera* (Uji JB) dan metode grafik. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Uji JB, jika J-B hitung < nilai χ^2 (*Chi Square*) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.³⁸

Analisis dan Pembahasan

Human Error Inflation Al-Maqrizi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Al-Maqrizi membagi inflasi menjadi dua bagian. Pertama inflasi yang disebabkan oleh inflasi alamiah seperti bencana alam dan kedua adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*) seperti administrasi pemerintahan yang tidak efektif (korupsi), sirkulasi jumlah uang beredar yang berlebihan di sektor non riil sehingga mengakibatkan decoupling antara sektor riil dan sektor moneter, pajak yang berlebihan serta interest rate. Adapun penulis membuat persamaan dari fungsi yang mempengaruhi inflasi yaitu jumlah uang beredar, *control of corruption* dan pajak di Indonesia.

- Korupsi

Ghulul adalah mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik dan tanpa prosedur aturan hukum syar'i, baik yang diambil itu benda milik negara maupun milik masyarakat.³⁹ Dalam sebuah negara pihak-pihak terkait yaitu pemerintah sebagai subjek (penggerak) roda pemerintahan dan rakyat Indonesia menjadi objeknya, sedangkan pekerjaannya adalah *ghulul* yang disamakan dengan konteks korupsi.⁴⁰

Adapun beberapa unsur yang mengindikasikan praktek *ghulul* dan korupsi. *Pertama* adalah unsur khianat, dimana orang yang seharusnya memegang amanah, tetapi menyalahgunakannya.

³⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate...*, hlm. 30.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darul al-Fikr, 1983), jilid ke- 3, hlm. 80

⁴⁰ Syamsul Anwar, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, Vol. 15 No. 1, 2008, hlm. 14-31.

Kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan kotor, busuk, jelek. *Ketiga* adalah mengambil hak orang lain tanpa prosedur yang dibenarkan hukum. *Keempat* adalah perbuatan yang dilakukan berakibat merugikan orang lain, dalam hal ini rakyat yang menjadi korban khususnya masyarakat menengah ke bawah. *Kelima* adalah sesuatu yang diambil merupakan milik orang banyak, baik milik negara ataupun masyarakat.⁴¹

Korupsi merupakan tindakan yang termasuk *extraordinary crime*. Di Indonesia korupsi sudah menjadi suatu hal yang dianggap lumrah,⁴² sehingga mengakar pada etika mayoritas masyarakat Indonesia, mengambil hak orang lain tanpa memperdulikan kemudahan yang akan ditimbulkan. Saat ini korupsi Indonesia sudah menyebar baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi bukti nyata betapa kerdilnya moralitas bangsa Indonesia yang dalam hal ini para pejabat pemerintahan yang diberikan amanah.

Ada beberapa dampak akibat tindakan korupsi dari aspek sosial dan ekonomi yaitu, pertama dalam perspektif sosial, korupsi dapat menimbulkan problematik yang signifikan. Seperti merosotnya investasi pada *human capital*. Ketiadaan moralitas dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak baik akan berpengaruh pada rusaknya mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan harta yang hanya bersirkulasi pada pihak tertentu saja. Maka, dengan hal tersebut terjadi, diduga akan memperlebar koefisien gini Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, dampak dari korupsi seperti inefisiensi hingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen, terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada sumber daya dan dana pembangunan, memperlambat pembangunan infrastruktur, penurunan tingkat investasi modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara serta tingkat kemiskinan meningkat.⁴³

⁴¹ M. A. Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Juris*, Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 61-86.

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1.

⁴³ Iskandar Sonhadji, "Perilaku Korupsi Dan Dampaknya," sumber dari <http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=198>, diakses pada tanggal 25 Mei 2014.

- Jumlah Uang Beredar

Jumlah Uang Beredar (JUB) merupakan penawaran uang (*money supply*). JUB didefinisikan sebagai M1 yang merupakan jumlah seluruh uang kartal (uang tunai) yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Dalam definisi yang lebih luas JUB sebagai M2 yang merupakan penjumlahan dari M1 dan deposit berjangka dan tabungan (*quasi money*).

Dalam teori kuantitas, dijelaskan oleh Irving Fisher melalui persamaan sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Dimana;

M = Jumlah Uang Beredar

V = *Velocity of money* (percepatan peredaran uang)

P = Tingkat harga

T = Jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam suatu tahun tertentu

Menurut Irving Fisher “pada hakikatnya perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga-harga”. Artinya jika jumlah uang beredar bertambah sebesar lima persen, maka tingkat harga pun akan meningkat sebesar lima persen atau sebaliknya.⁴⁴

- *Interest Rate*

Interest rate dibagi menjadi dua bagian yaitu 1) suku bunga nominal, suku bunga yang dapat diamati oleh pasar, dan 2) suku bunga riil, konsep yang mengukur tingkat bunga sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Pada saat ini, suku bunga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang beredar bertambah, sehingga konsumsi masyarakat meningkat, maka BI akan meningkatkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar (*tight money policy*), bertujuan mencapai sasaran akhir yaitu pengendalian inflasi. Sebaliknya, jika perekonomian lesu, maka BI akan menurunkan tingkat suku bunga (*easy money policy*).

Pada hakikatnya, Islam melarang penggunaan suku bunga,

⁴⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 77.

sudah menjadi bukti bahwa sistem moneter saat ini hanya sebagai solusi jangka pendek, akan tetapi dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang lebih besar. Sehingga hanya akan memperlebar *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter. Penggunaan *interest rate* masih digunakan sebagai instrumen dalam mencapai sasaran akhir yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, pada khususnya masyarakat menengah ke bawah, menurut Al-Maqrizi kaum yang termasuk ke dalam golongan pekerja kasar, nelayan, papa dan peminta-minta akan menderita bahkan mati kelaparan. Jika daya beli masyarakat turun, maka akan mempengaruhi konsumsi dari sektor rumah tangga. Maka dengan begitu, akan mempengaruhi tingkat perekonomian agregat. Sehingga akan menimbulkan masalah baru yaitu kemiskinan dan pengangguran. Jika demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah dan terjaganya stabilitas ekonomi dalam negeri sulit untuk dicapai sebab pertumbuhan ekonomi membutuhkan stimulus dana dari APBN seperti pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja dan lain-lain.

Hal yang sama terjadi pada kemiskinan dan pengangguran, bagaimana dapat diminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran jika tingkat inflasi tetap tinggi karena masyarakat menanggung *cost* yang lebih besar, dengan begitu, stabilitas ekonomi dalam negeri sulit untuk diraih jika indeks gini Indonesia semakin melebar. Sebagaimana mengutip teori Aristoteles⁴⁵ bahwa kesenjangan ekonomi akan mempengaruhi tingkat kejahatan dan pemberontakan. Jika hal ini terjadi akan menambah *cost* yang lebih besar terhadap perekonomian.

- Pajak

Pajak dapat dipadankan dengan kata *ḍarībah* (ضَرَبَةٌ), yang artinya membebaskan. Pajak merupakan kewajiban tam-bahan (*tatawwu'*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat.⁴⁶ Secara etimologi, *ḍarībah*, yang berasal dari kata dasar ضَرَبَ، يَضْرِبُ، ضَرْبًا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Akhyani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 1.

⁴⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 27.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata ض-ر-ب terdapat di beberapa ayat, antara lain pada surah Al-Baqarah ayat 61, yang artinya, "lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan". *Daraba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *darībah* (ضَرِيْبَةٌ), yang dapat berarti beban. *Darībah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *darāib* (ضَرَائِب).⁴⁸ Ada beberapa istilah pajak dalam Islam, yang membedakan istilah satu dengan lainnya yakni: pajak (*darībah*) yang objeknya yaitu *al-māl* (harta atau penghasilan), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*), objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya), dan objek *'ushr* adalah barang masuk (*impor*).⁴⁹

Islam tidak memperkenankan pemungutan pajak secara berlebihan. Efek dari pajak yang berlebihan pada perekonomian yaitu kontraksi pada kurva penawaran *agregatif*. Sehingga dapat mengakibatkan *efficiency loss* atau *dead weight loss*. Kontrol terkait kebijakan tarif pajak dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan kemampuan produksi barang dan jasa.⁵⁰

2002), hlm. 815.

⁴⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁰ Achamad Darmawan, "Inflasi Dalam Perspektif Konvensional dan Islam," tulisan diupload pada tanggal 19 Maret 2010, sumber dari <https://darmawanachmad.wordpress.com/page/2/>., diakses pada tanggal 15 April 2018.

Analisis Output Model Regresi Linear Berganda (RLB)

Nama Koefisien	Nilai Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.
Inflasi (Y)				
Uji t (parsial)				
C	-211.1994	28.79588	-7.334361	0.0000***
LNMoney Supply	0.392238	0.175773	2.231498	0.0284**
Control of Corruption	-476.8926	61.22288	-7.789451	0.0000***
LN Pajak	16.32989	2.279345	7.164292	0.0000***
R-Squared	0.433238	-	-	-
Uji F (simultan)	20.38423	-	-	0.0000***
Uji Heteroskedastisitas	7.294052	-	-	0.0631
Uji Autokorelasi	79.85043	-	-	0.0199
Uji Normalitas	2.410787	-	-	0.2995
Uji Linearitas	0.412341	-	-	0.5226
Uji Multikolinearitas	Ada (>0.8)	-	-	Ada (>0.8)
***Signifikan pada taraf nyata 1%				
** Signifikan pada taraf nyata 5%				
* Signifikan pada taraf nyata 10%				

Tabel 2: Hasil Model (RLB)

Dari tabel hasil regresi linear berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel X1 jumlah uang beredar (*LNMoney Supply*) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 5% ($0.05 > 0.028$). Artinya jika terjadi kenaikan dalam sirkulasi jumlah uang yang beredar sebesar 1 persen, maka diduga akan mempengaruhi kenaikan tingkat inflasi sebesar 0.392%, ceteris paribus. Jika JUB meningkat, dalam sistem moneter konvensional maka kebijakan yang akan diambil oleh BI yaitu *tight money policy*. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik kembali untuk menyimpan uangnya di bank. Hal ini jika tidak dikendalikan akan menyebabkan *decoupling* yang lebih melebar antara sektor riil dengan sektor moneter. Maka dari itu, Islam melarang penggunaan interest rate sebagai salah satu instrument kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar. Dan variabel X2 *control of corruption* menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1% ($0.01 > 0.000$). Artinya, jika terjadi kenaikan indeks *control of corruption* sebesar satu indeks, maka diduga akan menurunkan tingkat inflasi sebesar 476.89%, ceteris paribus.

Menurut Al-Maqrizi, korupsi dapat merugikan insentif yang akan diterima khususnya oleh para petani, nelayan dan masyarakat menengah ke bawah lainnya, serta harta yang hanya mengendap dan dikuasai oleh pihak tertentu, dan menyebabkan sikap *hedonism* dan konsumtif yang berlebihan dalam kalangan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya pengawasan dan pencegahan tingkat korupsi, dapat menurunkan tingkat inflasi yang dipicu oleh *cost push and demand pull inflation*. Selain itu, variabel LNPajak (X3) menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1%, artinya jika jumlah pajak meningkat sebesar 1% maka tingkat inflasi akan meningkat sebesar 16.33%, ceteris paribus. Pemungutan pajak yang berlebihan dapat mempengaruhi kapasitas barang/jasa yang diproduksi sehingga penawaran barang/jasa menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah permintaan barang/jasa. Hal ini dapat mempengaruhi proses mekanisme pasar, dimana jumlah penawaran tidak sama dengan jumlah permintaan. Jika mekanisme pasar tersebut belum dapat mencapai titik keseimbangan baru (*equilibrium*), maka tingkat harga akan meningkat (inflasi) yang disebabkan oleh *supply* barang yang lebih sedikit ($Q_s \neq Q_d$).

Hasil output dari persamaan ini dibuktikan dengan literatur dari kitab *Ighāsatul Ummah bikasyfil Ghummah Al-Maqrizi*, bahwasannya *mafsadah* akan terjadi oleh faktor-faktor seperti pemerintahan yang korup, pejabat agama, menteri, hakim yang melakukan suap-menyuap atau hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pajak yang berlebihan, sirkulasi jumlah uang yang cepat dan sistem moneter yang berbasis bunga. Inilah beberapa faktor yang dijelaskan oleh Al-Maqrizi dalam kitabnya yang mempengaruhi terjadinya krisis moneter, diawali dengan kenaikan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat.⁵¹

Perspektif Manajemen Syariah Terhadap Determinan Inflasi

Pemerintahan Islam menggunakan dua kebijakan dalam manajemen (pengelolaan) negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Peran kebijakan fiskal relatif dibatasi dengan dua hal yaitu, *pertama*, tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam, sebagaimana

⁵¹ Taqiyuddin Abi al-'Abas Ahmad bin 'Ali Al-Maqrizi, *Ighāsatul Ummah Bikasyfil Ghummah...*, hlm. 148.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum: 39, Q.S. An-Nisa: 160-161, Q.S. Ali-Imron: 130, Al-Baqarah: 278-279. *Kedua*, Islam tidak membolehkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai praktek perjudian yang mengandung spekulasi. Pemerintah Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah mencapai *nishab*.⁵²

Kebijakan fiskal Islam memiliki konsentrasi dalam menekan laju inflasi, sebab penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan *cost push inflation* itu sendiri. Islam melarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam konsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan dan juga transaksi yang bersifat penindasan salah satu pihak. Jika keadaan ekonomi diasumsikan dalam kondisi *full employment*, maka kenaikan agregat tidak akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional. Dengan kata lain, pada tingkat output yang sama tidak akan dinaikkan sebagai kenaikan harga yang tinggi dan langkah yang bisa diambil adalah memaksimalkan fungsi penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaan dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi.⁵³

Selain itu, kebijakan fiskal dalam Islam berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai manifestasi keuntungan yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dijalankan. Para pemegang saham akan saling membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya masing-masing, dengan demikian baik transaksi sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah dapat menjalankan prinsip bagi hasil tanpa bunga. Menurut Ibnu Khaldun (1404) cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan resesi yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah merupakan pasar terbesar.⁵⁴

Di samping itu, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, melainkan hal yang dilakukan yaitu kebijakan mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Syekh Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa,

⁵² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 122.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*.

sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Hal utama dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Variabel yang harus diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter di perekonomian Islam adalah stok uang, bukan tingkat suku bunga.⁵⁵

Kebijakan moneter Islam memberikan pandangan untuk menjaga kestabilan maka ada beberapa hal berikut yang dilarang yaitu, 1) permintaan yang tidak riil, motif permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga, 2) penimbunan mata uang, 3) transaksi *talaqqi rukban*, yaitu mencegah penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian harga, 4) transaksi *kali bi kali*, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai dibolehkan namun transaksi future tanpa ada barangnya adalah dilarang, 5) segala bentuk riba.⁵⁶

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa determinan inflasi yaitu jumlah uang beredar, seberapa baik tingkat kontrol korupsi, dan jumlah pajak. *LN Money Supply* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 5%. Artinya jika terjadi kenaikan dalam sirkulasi jumlah uang yang beredar sebesar 1 persen, maka diduga akan mempengaruhi kenaikan tingkat inflasi sebesar 0.392%, ceteris paribus. *Control of corruption* menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1%. Artinya, jika terjadi kenaikan indeks *control of corruption* sebesar satu indeks, maka diduga akan menurunkan tingkat inflasi sebesar 476.89%, ceteris paribus. Dan *LN Pajak* menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap tingkat inflasi pada taraf nyata 1%, artinya jika jumlah pajak meningkat sebesar 1% maka tingkat inflasi akan meningkat sebesar 16.33%, ceteris paribus.

Kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam melarang adanya penggunaan instrumen suku bunga, perjudian, spekulasi dan hal-hal yang mengandung maysir, gharar dan riba. Adapun kebijakan fiskal Islam yaitu memaksimalkan fungsi penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini dapat digunakan untuk berbagai

⁵⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 193-194.

⁵⁶ *Ibid.*

macam kegunaan dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan sistem bagi hasil. Sedangkan kebijakan moneter dalam Islam yaitu mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Variabel yang harus diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter di perekonomian Islam adalah stok uang, bukan tingkat suku bunga.

Rekomendasi Kebijakan

Sebuah kebijakan perekonomian (fiskal dan moneter) ditentukan oleh sistem yang digunakan. Untuk menyelesaikan permasalahan *decoupling* antara sektor moneter dan fiskal maka diperlukan adanya peniadaan instrumen suku bunga. Suku bunga hanya menjadi tekanan untuk aktivitas perekonomian, sehingga yang diperlukan adalah mendorong pertumbuhan sektor riil dengan sistem bagi hasil bukan suku bunga. Sebab secara makro, sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh sistem ribawi tidak akan pernah benar-benar sehat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S., Kapur, B., & Mundial, B. 1990. "How Indonesia's Monetary Policy Affects Key Variables." *Asia Regional Office, Country Department V, World Bank*, 1990.
- Alamsyah, H., & Masyhuri, A. K. 2000. "Inflation Targeting Sebagai Kerangka Kerja Alternatif Dalam Kebijakan Moneter." *Paper, Mimeo*.
- Al-Maqrizi. T. A. A. A. B. 'A. 2007. *Ighātsatul Ummah Bikasyfil Ghummah*. El-Haram: 'Ainul Madrasat wal Buhuts al-Insaniyah wal Ijtima'iyah.
- Amelia, M. A. 2017. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Juris*, Vol. 9 No. 1.
- Anwar, S. 2008. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*. Vol. 15 No. 1.
- Bank Indonesia, "Data Inflasi Indonesia", sumber dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, diakses pada tanggal 15 April 2018.
- Boediono. 1995. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. No. 2 Edisi 4.
- Gujarati, D. N. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Diterjemahkan oleh Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

- _____. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika jilid 1*. Diterjemahkan oleh Mulyadi. Jakarta: Erlangga.
- Endri, E. 2008. "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia." *Economic Journal of Emerging Markets*. Vol. 13 No. 1.
- Gunawan, E. 2003. "Beberapa Penyelesaian Inflasi Menurut Sistem Keuangan Islam di Indonesia." *ISEFID Review*. Vol. 2 No. 1.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatta, M. 2008. Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam. *Jurnal Ekonomi Ideologi*. Hal 7-8.
- Huda, N., Nasution, M. E., & Idris, H. R. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imam, G. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karim, A. A. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kato, H. 2012. "Reconsidering al-Maqrīzī's View on Money in Medieval Egypt," *Mediterranean World*. Vol. 21.
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Munawir, A. M. 2002. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nduru, R. E., Situmorang, M., & Tarigan, G. 2014. "Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi di Deli Serdang. *Saintia Matematika*, Vol. 2 No. 1.
- Pangiuk, A. 2013. "Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al-Maqrizi." *Jurnal Kontekstualita*. Vol. 28 No. 1.
- Parakkasi, I. 2016. "Inflasi Dalam Perspektif Islam." *Laa Maisyir*. Vol. 3 No. 1.
- Prathama, R., & Mandala, M. 2005. *Teori Ekonomi Makro, edisi ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Riani, W. 2003. "Inflasi dan Tinjauannya Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kinerja*. Vol. 5 No. 1.
- Rusydiana, A. S. 2009. "Determinan Inflasi Indonesia: Perbandingan Pendekatan Islam dan Konvensional." *JIBE: Journal of Islamic Business and Economic*. Vol. 3 No.1

- Sabiq, S. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Darul al-Fikr. Jilid ke- 3.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, R. Y. 1999. "Real Exchange Rate Targeting And Inflation in Indonesia: Theory And Empirical Evidence." *Applied Financial Economics*. Vol. 9 No. 4.
- Sonhadji, I. 2008. "Perilaku Korupsi dan Dampaknya." Sumber dari <http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=198>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 13.51 wib.
- Sudarsono, & Edilius. 2001. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan II.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Ketiga.I

